

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan serangkaian analisis terhadap data penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2019- 2024, serta berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama yang ingin mengkaji sejauh mana PAD mempengaruhi IPM. Hasil estimasi menunjukkan bahwa peningkatan PAD mampu mendorong perbaikan capaian IPM di suatu daerah. Artinya, daerah yang berhasil mengoptimalkan pendapatan aslinya melalui pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dengan ruang fiskal yang semakin luas, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih memadai pada program-program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas fiskal tersebut tercermin dalam kenaikan IPM secara berkelanjutan.
2. Penelitian ini juga menemukan bahwa Dana Transfer dari pemerintah pusat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian kedua yang mengevaluasi pengaruh dana

transfer terhadap perkembangan IPM. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Transfer memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendorong peningkatan IPM. Bahkan, pengaruh Dana Transfer terhadap IPM terbukti lebih dominan dibandingkan PAD. Fenomena ini mencerminkan bahwa hingga saat ini, banyak kabupaten/kota di Indonesia, terutama di kawasan timur dan daerah tertinggal, masih sangat bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dana Transfer berperan sebagai instrumen pemerataan yang memastikan daerah dengan kapasitas fiskal terbatas tetap mampu menyediakan layanan publik yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah dapat ditekan melalui kebijakan transfer fiskal yang tepat sasaran.

3. Secara simultan, PAD dan Dana Transfer terbukti bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian ketiga yang menganalisis pengaruh simultan kedua variabel. Hasil pengujian menegaskan bahwa daya dukung finansial daerah, baik yang berasal dari kemampuan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat, merupakan determinan penting dalam mendorong percepatan pembangunan manusia. Kedua sumber pendapatan daerah ini saling melengkapi dalam memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. PAD mencerminkan kemandirian dan kekuatan ekonomi lokal, sementara Dana Transfer menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah-daerah yang belum memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Sinergi antara kedua sumber pendanaan ini menjadi kunci dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia secara merata di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat teori desentralisasi fiskal maupun teori pengeluaran publik. Kedua pendekatan teoritis tersebut menegaskan bahwa semakin besar ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Pada gilirannya, optimalisasi layanan fundamental

di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berperan esensial dalam mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat dan menjamin keberlanjutan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun demikian, masih terdapat faktor-faktor lain di luar PAD dan Dana Transfer yang turut mempengaruhi IPM, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami secara utuh determinan pembangunan manusia di Indonesia.

5.3 Saran

Merujuk pada temuan penelitian mengenai dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia selama kurun waktu 2019-2024, berikut adalah sejumlah rekomendasi yang dapat diajukan.

1. Bagi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang tergolong tinggi misalnya kota-kota besar atau wilayah yang memiliki dinamika ekonomi yang pesat disarankan untuk terus memperkuat kemandirian keuangannya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi perluasan basis pajak daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perpajakan, serta pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara lebih produktif. Dengan meningkatnya PAD, ruang fiskal daerah akan semakin luas, sehingga pemerintah daerah memiliki keluwesan anggaran yang lebih besar untuk membiayai sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang merupakan pilar utama pembentuk IPM.
2. Bagi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih sangat menggantungkan diri pada Dana Transfer dari pemerintah pusat, diperlukan peningkatan efektivitas pengelolaan dana tersebut melalui perencanaan yang lebih terarah, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Alokasi Dana Transfer sebaiknya difokuskan pada

program-program yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan IPM, seperti penyediaan layanan kesehatan, perbaikan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan demikian, Dana Transfer tidak hanya berperan sebagai alat pemerataan fiskal, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Bagi pemerintah pusat, temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa Dana Transfer masih memiliki peranan krusial dalam mendorong kemajuan pembangunan manusia, khususnya di wilayah-wilayah dengan kapasitas fiskal yang terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah pusat hendaknya terus menyempurnakan kebijakan transfer ke daerah dengan mempertimbangkan secara cermat aspek kebutuhan fiskal, tingkat kemiskinan, serta capaian pembangunan manusia di masing-masing daerah. Di samping itu, pengawasan terhadap penggunaan Dana Transfer perlu diperketat agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian hasil, terutama dalam mendukung sektor-sektor yang memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan IPM.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi IPM, seperti tingkat kemiskinan, belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, atau kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengelompokkan daerah berdasarkan tingkat kapasitas fiskal atau karakteristik wilayah sehingga perbedaan pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap IPM dapat dianalisis secara lebih mendalam.